



**BUPATI LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG  
NOMOR 52 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 36  
TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LEBONG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG,**

- Menimbang** : bahwa dengan adanya Perubahan Nomenklatur pada beberapa bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong maka perlu menetapkan peraturan Bupati Lebong tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 1543);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); dan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

**PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 36  
TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
LEBONG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB III**

**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
    1. Bagian Pemerintahan, membawahi:
      - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
      - b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan;
      - c) Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.
    2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
      - a) Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
      - b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
      - c) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
    3. Bagian Hukum, membawahi:
      - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
      - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
      - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.

Menetapkan

- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi:
    - a) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
    - b) Sub Bagian Perekonomian;
    - c) Sub Bagian Sumber Daya Alam.
  2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
    - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
    - b) Sub Bagian Pengendalian Program;
    - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:
    - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
    - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
    - c) Sub Bagian Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
1. Bagian Umum membawahi:
    - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
    - b) Sub Bagian Keuangan;
    - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
  2. Bagian Organisasi, membawahi :
    - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
    - b) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
    - c) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
  3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi:
    - a) Sub Bagian Protokol;
    - b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan;
    - c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
- e. Jabatan Fungsional;
- f. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik;
- g. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- h. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan SDA.
- (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei

pada tanggal 16 Desember 2019

*H.* **BUPATI LEBONG,** *P*  
*21/01-2020*  
**H. ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tubei

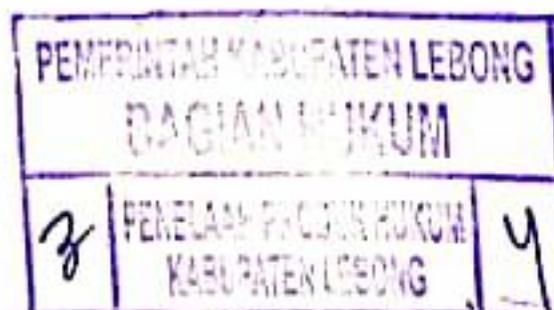
pada tanggal 16 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,**

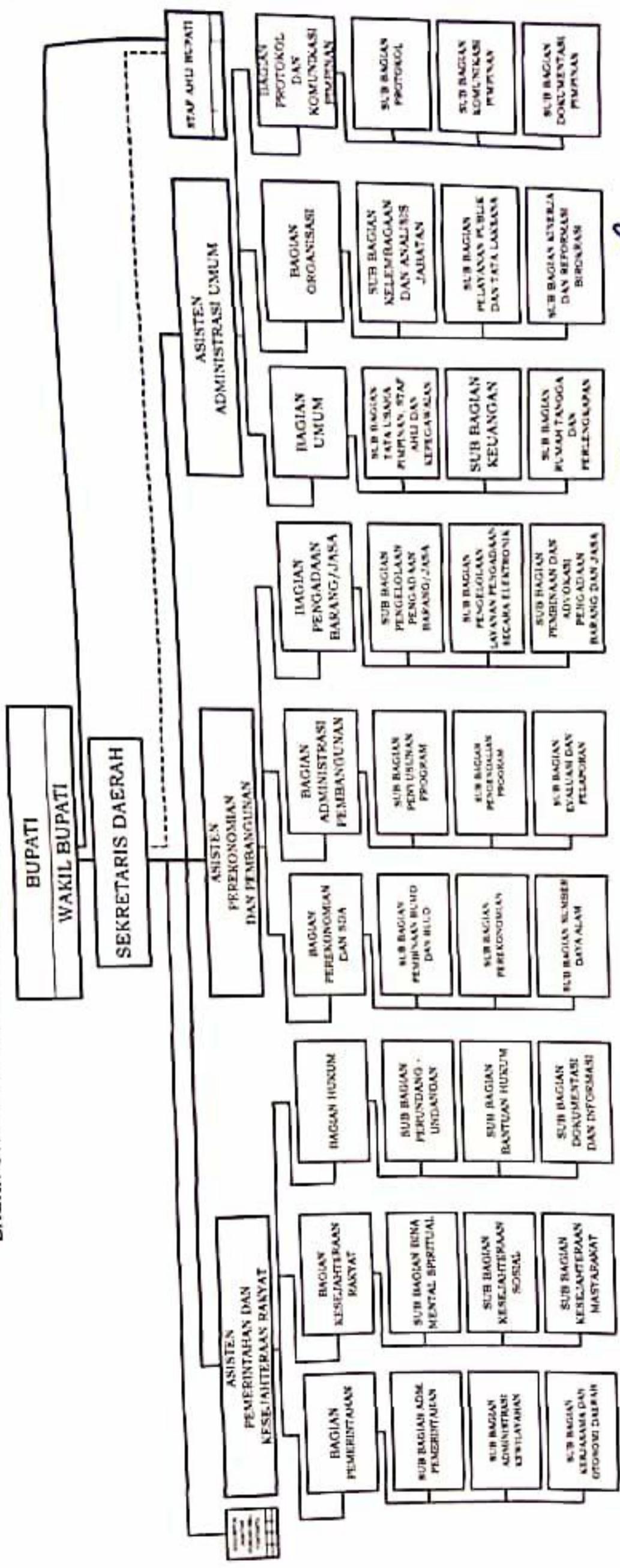
*H. Mustarani*

**H. MUSTARANI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 NOMOR**



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBONG



Diundangkan di Tabei  
 pada tanggal Desember 2019  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,

*[Signature]*

H. MUSTARANI

BUPATI LEBONG  
 24/12/2019

*[Signature]*  
 H. ROSJONSYAH

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG  
 BAGIAN HUKUM  
 PENELAJAH PRODUK HUKUM  
 KABUPATEN LEBONG